



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 96/A/2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 46/C/2025  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 46/C/2025 telah ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan kebutuhan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 46/C/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 46/C/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025, tersebut dalam Lampiran sehingga setelah diubah secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.  
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 28 Februari 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 96/A/2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON  
 PROGO NOMOR 46/C/2025 TENTANG PROGRAM  
 PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI  
 TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN BUPATI

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN)	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik	Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik	Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Administrasi Pembangunan	Baru	Triwulan 1	
2.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Komunikasi dan Informatika	Baru	Triwulan 1	
3.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo	Landasan hukum Pengendalian Pembangunan Infrastruktur fisik di Kabupaten Kulon Progo yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	Baru	Triwulan 1	
4.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Perubahan ketentuan jadwal pemakaian pakaian dinas guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Perubahan	Triwulan 2	
5.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Rutin	Triwulan 2	

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN)	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Rutin	Triwulan 2	
7.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Rutin	Triwulan 3	
8.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Rencana Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Rutin	Triwulan 3	
9.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Rutin	Triwulan 3	
10.	Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan kajian untuk menghasilkan gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah</li> <li>b. gambaran/kondisi riset dan inovasi di daerah</li> <li>c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya</li> <li>d. tema prioritas riset dan inovasi di daerah</li> <li>e. tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah</li> <li>f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah</li> <li>g. strategi riset dan inovasi di daerah dan</li> <li>h. peta jalan riset dan inovasi di daerah</li> </ul>	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Baru	Triwulan 3	

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN)	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
11.	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Pedoman arah kebijakan, strategi dan program pembangunan pangan dan gizi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Baru	Triwulan 3	
12.	Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2025-2026	rencana kerja tahunan untuk meningkatkan kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja tingkat nasional yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Baru	Triwulan 3	
13.	Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan	a. Tahapan penyelenggaraan SAKIP Kalurahan b. Indikator kinerja Lurah c. Perjanjian Kinerja Lurah, pengukuran kinerja dan pelaporan d. Evaluasi Kinerja Lurah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	Triwulan 1	
14.	Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan	a. Jenis pelayanan di Pemerintah Kalurahan b. Ruang lingkup penyelenggaraan Standar Pelayanan di Pemerintah Kalurahan c. Instrumen pendukung pelayanan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	Triwulan 1	
15.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Lurah	a. Kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan hak Lurah b. Tata cara Pemilihan Lurah serentak Penentuan kebijakan Pemilihan Lurah Serentak c. Tata cara Pemilihan Lurah Pengganti Antar Waktu melalui Musyawarah Kalurahan d. Laporan Lurah e. Larangan dan sanksi f. Pengangkatan dan pemberhentian Lurah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	Triwulan 3	

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN)	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
16.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan hak Pamong Kalurahan</li> <li>b. Tata cara penjarangan dan penyaringan Pamong Kalurahan</li> <li>c. Tata cara mutasi jabatan Pamong Kalurahan</li> <li>d. Larangan dan sanksi</li> <li>e. Pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan</li> </ul>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	Triwulan 3	
17.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Susunan organisasi BPK</li> <li>b. Fungsi, tugas, wewenang dan hak BPK</li> <li>c. Kewajiban, hak dan larangan anggota BPK</li> <li>d. Meknaisme Musyawarah BPK</li> <li>e. Tata cara pengisian keanggotaan BPK</li> <li>f. Tata cara peresmian dan pemberhentian anggota BPK</li> <li>g. Tata cara penggantian antar waktu anggota BPK</li> </ul>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	Triwulan 2	
18.	Unsur Staf Pamong Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan hak Unsur Staf Pamong Kalurahan</li> <li>b. Tata cara pengisian Unsur Staf Pamong Kalurahan</li> <li>c. Larangan dan sanksi</li> <li>d. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Staf Pamong Kalurahan</li> </ul>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	Triwulan 2	
19.	Pedoman Penatausahaan Adminsitrasi Keuangan Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Keuangan Kalurahan</li> <li>b. Pengelolaan administrasi keuangan kalurahan</li> <li>c. Rekening Kas Kalurahan</li> <li>d. Penatausahaan keuangan Kalurahan</li> <li>e. Pencatatan Penatausahaan</li> <li>f. Kelengkapan Pertanggungjawaban</li> </ul>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	Triwulan 3	

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN)	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
20.	Pedoman Penyusunan RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan	a. Pedoman Penyusunan RPJM Kalurahan b. Pedoman Penyusunan RKP Kalurahan	Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	Triwulan 3	
21.	Penghasilan dan Tunjangan bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah dan Pamong b. Tunjangan anggota BPKal Penghasilan unsur staf pamong	Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	Triwulan 4	
22.	Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan	a. Pengelolaan ADK b. Alokasi ADK Kabupaten c. Alokasi ADK setiap Kalurahan d. Penyaluran ADK e. Pertanggungjawaban ADK	Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	Triwulan 3	
23.	Penetapan, Penegasan, Dan Pengesahan Batas Kalurahan Garongan, Pleret, Bugel, Kanoman, Depok, Bojong, Tayuban, Gotakan, Panjatan, Cerme Dan Krembangan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo	a. Maksud dan Tujuan Penetapan, Penegasan dan Penetapan Batas Kalurahan b. Batas Kalurahan Garongan, Pleret, Bugel, Kanoman, Depok, Bojong, Tayuban, Gotakan, Panjatan, Cerme Dan Krembangan. c. Peta Batas Kalurahan d. Koordinat Batas Kalurahan	Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	Triwulan 3	

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN)	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
24.	Standar Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	a. Pedoman dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan kalurahan b. Indikator kinerja dalam mewujudkan akuntabilitas c. Tata cara penilaian d. Pemingkatan dan Penghargaan e. Sanksi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	Triwulan 1	
25.	Pedoman Pengelolaan Administrasi Kalurahan	a. Administrasi di Kalurahan b. Kewenangan Lurah dan Pamong Kalurahan c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	Triwulan 4	
26.	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa	a. Organisasi BUM Desa b. Rencana Program Kerja c. Pertanggungjawaban d. Penghasilan e. Pembagian Hasil Usaha	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perubahan	Triwulan 3	
27.	Peraturan Bupati tentang Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	Triwulan 4	

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN)	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
28.	Penyelenggaraan Izin Penggunaan Toko/Kios, Los, Bango, Tenda, dan Tempat Dasaran di Pasar Rakyat	Pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Dinas Perdagangan	Baru	Triwulan 4	
29.	Pengelolaan Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga	Pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Dinas Perdagangan	Baru	Triwulan 4	
30.	Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2025	Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2025	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rutin	Triwulan 2	
31.	Pengelolaan Alat Penerangan Jalan	Pengelolaan Alat Penerangan Jalan meliputi pemasangan, pemeliharaan dan pengawasan	Dinas Perhubungan	Baru	Triwulan 3	
32.	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	Triwulan 1	
33.	Pemanfaatan Rumah Khusus	Pedoman pemanfaatan rumah khusus	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	Triwulan 1	
34.	Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif Penyelenggaraann Bangunan Gedung	Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif Penyelenggaraann Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	Triwulan 1	

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN)	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
35.	Tata Naskah Dinas	Tata Naskah Dinas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	Triwulan 1	
36.	Penataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	Penataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru	Triwulan 1	
37.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rutin	Triwulan 1	
38.	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rutin	Triwulan 1	
39.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rutin	Triwulan 2	
40.	Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026	Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rutin	Triwulan 2	
41.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rutin	Triwulan 2	

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN)	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
42.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rutin	Triwulan 3	
43.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rutin	Triwulan 2	
44.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rutin	Triwulan 4	
45.	Ketentuan Pemungutan Pajak Daerah	Ketentuan Pemungutan Pajak Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	Triwulan 1	
46.	Ketentuan Pemungutan Retribusi Daerah	Ketentuan Pemungutan Retribusi Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	Triwulan 1	
47.	Penatausahaan Keuangan Daerah	Pedoman penatausahaan belanja	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	Triwulan 3	
48.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penyesuaian dengan perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perubahan	Triwulan 1	

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN)	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
49.	Pedoman Arsip Vital	Pedoman Arsip Vital	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baru	Triwulan 4	
50.	Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2026	Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2026	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rutin	Triwulan 4	
51.	Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perubahan	Triwulan 1	
52.	Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah	Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan	Baru	Triwulan 1	
53.	Tata Cara Registrasi Arsip Sebagai Memori Kolektif Bangsa	Tata Cara Registrasi Arsip Sebagai Memori Kolektif Bangsa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baru	Triwulan 1	
54.	Penugasan kepada Kalurahan dan Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan	Pedoman Penugasan kepada Kalurahan dan Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan guna mendekatkan layanan pada masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru	Triwulan 1	
55.	Penerimaan Tamu Dinas	Penerimaan Tamu Dinas	Bagian Pemerintahan	Baru	Triwulan 2	

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN)	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
56.	Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Bagian Organisasi	Baru	Triwulan 2	
57.	Jabatan Fungsional	Pengaturan mengenai Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Baru	Triwulan 3	
58.	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Mekanisme Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Baru	Triwulan 1	
59.	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Goa Kiskendo	Penataan bangunan dan lingkungan untuk mewujudkan destinasi wisata unggulan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki daya tarik wisatawan, mendukung penguatan identitas budaya lokal, menjadi bagian dari cagar alam geologi berupa goa karst, serta berfungsi sebagai pusat pengembangan wisata budaya berbasis konsep geohéritage	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> )	Baru	Triwulan 2	
60.	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Kalurahan Hargorejo	Penataan bangunan dan lingkungan untuk mewujudkan Kawasan Wisata Edukasi Tambang Mangan Kliripan-Karangsari yang terpadu, lestari, dan berdaya saing	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> )	Baru	Triwulan 2	
61.	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cangkring-Nagung	Penataan bangunan dan lingkungan kawasan Cangkring – Nagung yang ramah lingkungan sebagai pendukung ekonomi lokal	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> )	Baru	Triwulan 2	
62.	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Air Front MICE Temon	Penataan bangunan dan lingkungan untuk mewujudkan kawasan Air Front MICE Temon yang Berkelas Dunia Berbasis Karakter Budaya	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> )	Baru	Triwulan 2	

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN)	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
63.	Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Zona Kawasan Pariwisata Borobudur	Pengaturan Tata Ruang di Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur secara detail untuk memberi kepastian pemanfaatan ruang di Kawasan tersebut	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> )	Baru	Triwulan 2	
64.	Transformasi Digitalisasi Layanan Kepegawaian pada Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Transformasi Digitalisasi Layanan Kepegawaian pada Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru	Triwulan 2	
65.	Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar	Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru	Triwulan 3	
66.	Pemeriksaan Pajak	Mekanisme Pemeriksaan Pajak Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	Triwulan 3	
67.	Tata Cara Perforasi	Tata Cara penyelenggaraan perforasi pada dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan retribusi daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	Triwulan 3	
68.	Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	Triwulan 1	
69.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	Triwulan 2	
70.	Insentif Fiskal Pajak Hiburan	Insentif Fiskal Pajak Hiburan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	Triwulan 3	

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN)	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
71.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perubahan	Triwulan 3	
72.	Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Wisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo	Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Wisata	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	Triwulan 2	

Wates, 28 Februari 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN